

Dampak Pandemi Corona Virus Terhadap UMKM di Indonesia

Salma Nur Afifah

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung,
salmanurafifa97@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.24071/exero.v6i1.6687>

Abstrak

Dampak akibat corona virus atau yang lebih dikenal dengan COVID 19 berpengaruh besar terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Bukan hanya di Indonesia saja tapi bahkan hampir melanda seluruh negara di dunia termasuk negara - negara maju sampai negara berkembang sekalipun. Indonesia termasuk negara yang didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) perlu memberikan perhatian khusus terhadap sektor ini mengingat kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia yang cukup besar. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian Jurnal ini yaitu untuk mengetahui tantangan ekonomi dan bisnis akibat pandemi COVID-19. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa dampak pandemi Corona Virus terhadap eksistensi UMKM di Indonesia dan bagaimana solusi dalam membantu UMKM bertahan dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini. Akibat COVID-19 tersebut memberikan dampak yang cukup besar pada perekonomian di Indonesia terutama pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Tulisan ini mencoba untuk menganalisa dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia dan bagaimana solusi dalam membantu UMKM bertahan dalam situasi pandemi COVID-19.

Kata kunci: UMKM, Tenaga Kerja, Bantuan Keuangan, Kebijakan Struktural

Abstract

The impact of the corona virus or better known as COVID-19 has a major impact on the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). Not only in Indonesia, but almost all countries in the world, including developed countries to developing countries though. Indonesia, including a country dominated by Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) needs to pay special attention to this sector considering the contribution of MSME to the Indonesian economy is quite large. This research is a qualitative research type. The results of this journal research are to find out the economic and business challenges due to the COVID-19 pandemic. The purpose of this study is to analyze the impact of the Corona Virus pandemic on the existence of MSME in Indonesia and how to find solutions to help MSME survive in the current COVID-19 pandemic situation. The impact of COVID-19 has had a considerable impact on the economy in Indonesia, especially for Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). This paper tries to analyze the impact of the COVID-19 pandemic on MSME in Indonesia and how solutions can help MSME survive in the COVID-19 pandemic situation.

Keywords: MSME, Manpower, Financial Aid, Structural Policy

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) saat ini sudah bisa dikatakan menjadi tulang punggung bangsa Indonesia. Dengan percepatan progres Usaha Mikro Kecil Menengah maka akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkualitas tercipta jika rakyat kalangan paling bawah merasakan juga pertumbuhan ekonomi yang baik. Artinya kesenjangan ekonomi masyarakat antara lapisan semakin kecil. Salah satu dampaknya adalah memperkecil kecemburuan sosial.

Pandemi virus Corona bukan hanya sekedar bencana kesehatan, virus yang dikenal sebagai COVID-19 ini telah menimbulkan kekacauan di sektor ekonomi. Tidak hanya industri besar, pandemi virus Corona telah membuat pelaku UKM di Indonesia mulai gelisah. Sebuah studi menyebut jika COVID-19 membuat Indonesia mengalami penurunan persentase pertumbuhan ekonomi sebesar 0.1% di tahun 2020. Secara garis besar, berikut merupakan dampak nyata yang disebabkan COVID-19 terhadap sektor UKM di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini memberikan dampak terhadap berbagai sektor. Pada tataran ekonomi global, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian domestik negara-bangsa dan keberadaan UMKM.

Laporan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyebutkan pandemi ini berimplikasi pada ancaman krisis ekonomi yang cukup besar yang ditandai dengan berhentinya aktivitas produksi di berbagai negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah pada ketidakpastian. (1) OECD memprediksi bahwa akan terjadi penurunan tingkat output antara seperlima hingga seperempat di berbagai negara dengan pengeluaran konsumen berpotensi turun sekitar sepertiga. (2) Prediksi ini juga mengancam perekonomian nasional Indonesia. Aknolt Kristian Pakpahan menyebutkan ada tiga implikasi bagi Indonesia terkait pandemi COVID-19 ini yakni sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi. (3) Indonesia yang didominasi oleh keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional juga terdampak secara serius tidak saja pada aspek total produksi dan nilai perdagangan akan tetapi juga terhadap jumlah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaannya karena pandemi

ini. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 64.194.057 UMKM yang ada di Indonesia (atau sekitar 99 persen dari total unit usaha) dan mempekerjakan 116.978.631 tenaga kerja (atau sekitar 97 persen dari total tenaga kerja di sektor ekonomi). Tujuan penelitian ini adalah yaitu untuk menganalisa dampak pandemi COVID-19 terhadap eksistensi UMKM di Indonesia dan bagaimana solusi dalam membantu UMKM bertahan dalam situasi pandemi COVID-19.

Berdasarkan hasil survei *Katadata Insight Center* (KIC) yang dilakukan terhadap 206 pelaku UMKM di Jabodetabek, mayoritas UMKM sebesar 82,9% merasakan dampak negatif dari pandemi ini dan hanya 5,9% yang mengalami pertumbuhan positif. Kondisi pandemi ini bahkan menyebabkan 63,9% dari UMKM yang terdampak mengalami penurunan omzet lebih dari 30%. Hanya 3,8% UMKM yang mengalami peningkatan omzet. Survei KIC tersebut juga menunjukkan para UMKM melakukan sejumlah upaya untuk mempertahankan kondisi usahanya. Mereka melakukan sejumlah langkah efisiensi seperti menurunkan produksi barang/jasa, mengurangi jam kerja, jumlah karyawan, dan saluran penjualan/pemasaran. Meski begitu ada juga UMKM yang mengambil langkah sebaliknya yaitu menambah saluran pemasaran sebagai bagian strategi bertahan.

Dari kondisi tersebut, dapat terlihat bahwa sektor UMKM yang mayoritas pelakunya adalah warga kelas menengah ke bawah terdampak besar akibat pandemi COVID-19. Perusahaan yang sukses di era pandemi merupakan perusahaan yang dapat beradaptasi dengan empat karakteristik tersebut. Pelaku usaha ke termasuk UMKM perlu berinovasi dalam memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar. Para pelaku usaha ini juga dapat menumbuhkembangkan berbagai gagasan dan ide usaha baru yang juga dapat berkontribusi sebagai pemecah persoalan sosial-ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian UMKM menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) menyebutkan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang atau perorangan dan atau badan usaha perorangan, sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif

yang berdiri sendiri, dilakukan orang perorangan bukan merupakan anak perusahaan, bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dan bukan menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, serta usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan orang perorangan bukan merupakan anak perusahaan, bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dan bukan menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar. UMKM dari segi omzet mempunyai kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Usaha

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha)	Omzet (dalam 1 tahun)
Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal Rp 300 juta
Usaha Kecil	Lebih dari Rp 50 juta - Rp 500 juta	Lebih dari Rp 300 juta - Rp 2,5 miliar
Usaha Menengah	Lebih dari Rp 500 juta - Rp 10 miliar	Lebih dari Rp 2,5 miliar - Rp 50 miliar
Usaha Besar	Lebih dari Rp 10 miliar	Lebih dari Rp 50 miliar

Sumber: UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Tujuan pemberdayaan UMKM menurut UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab II (Pasal 5) adalah sebagai berikut:

Berdasarkan aspek manajemen karakteristik UMKM adalah sebagai berikut:

1. Jenis komoditi/barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu.
2. Tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu.
3. Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan.
4. Sumber daya manusia "SDM" didalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni.
5. Biasanya tingkat pendidikan SDM nya masih rendah.
6. Biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan nonbank.
7. Pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas, termasuk NPWP.

Potensi UMKM menurut UU No 20 tahun 2008 adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan, sedangkan menurut Peraturan Menteri

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha kecil Menengah Tahun 2015-2019 menyebutkan bahwa “Potensi UMKM ditunjukkan oleh perannya sebagai sumber pendapatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan barang dan jasa domestik, penciptaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan nilai tambah yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi”. Potensi UMKM ke depan dapat dipengaruhi oleh sisi internal dari UMKM dan eksternal (lingkungan).

Potensi internal yaitu (1) Jumlah UMKM yang besar merupakan modal dasar untuk berkontribusi lebih besar dalam perekonomian; (2) Struktur dan karakteristik organisasi, usaha dan pengelolaan UMKM yang cukup fleksibel memberi kemudahan untuk menyesuaikan dengan perubahan kapasitasnya, serta perubahan pasar dan perekonomian; (3) UMKM menghasilkan produk dan jasa dengan harga yang terjangkau masyarakat, sehingga berkontribusi dalam penguatan pasar domestik, khususnya dalam penyediaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat; (4) Produk-produk UMKM sebagian besar memiliki kaitan yang kuat dengan sumber daya, budaya lokal, pengetahuan, keterampilan tangan, dan pola kerja yang diwariskan secara turun-temurun. Penggunaan sumber daya lokal mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor; dan (5) Jumlah UMKM yang besar merupakan potensi untuk pengembangan keterkaitan usaha dalam skema rantai nilai dan rantai pasok sehingga efisiensi sistem produksi dan pemasaran dapat ditingkatkan.

Potensi Eksternal UMKM yaitu (1) Kepastian hukum bagi pengembangan UMKM; (2) Kemudahan mendirikan usaha secara informal di Indonesia, khususnya pada skala mikro, menjadikan potensi penumbuhan wirausaha baru dan UMKM sangat besar; (3) Kemudahan untuk mendirikan usaha juga didukung dengan ketersediaan sumber daya alam dan skala permintaan yang besar (populasi penduduk yang besar); (4) Kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan pemangku kepentingan lainnya; dan (5) Peningkatan proporsi penduduk usia produktif, yang disertai pendidikan dan keterampilan yang lebih tinggi, menjadi sumber tenaga kerja.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian ini akan melihat Potensi UMKM ditunjukkan oleh perannya sebagai sumber pendapatan masyarakat,

pemenuhan kebutuhan barang dan jasa domestik, penciptaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan nilai tambah yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Potensi UMKM akan dilihat dari perspektif dalam menciptakan a) Potensi sumber pendapatan masyarakat (Jumlah Usaha/Perusahaan); b) Potensi penanggulangan pengangguran (Jumlah Tenaga Kerja); c) Potensi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB); d) Potensi terhadap devisa negara; e) Potensi Investasi.

METODE PENELITIAN

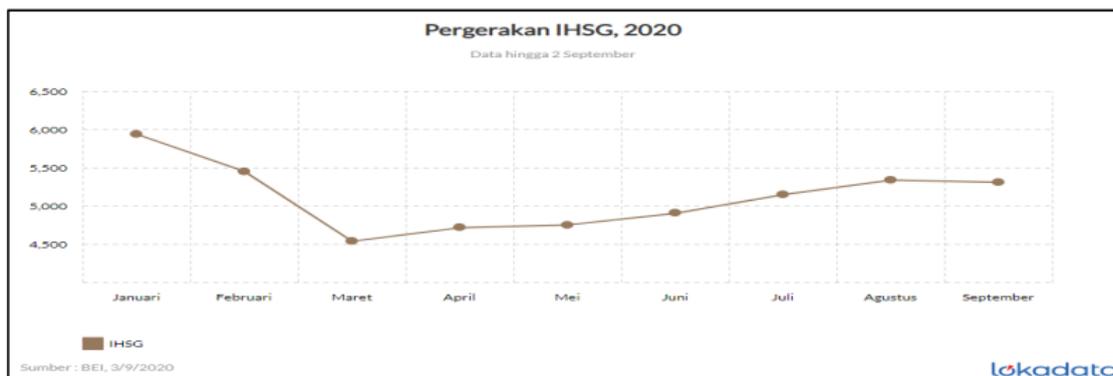
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak pandemi COVID-19 terhadap eksistensi UMKM di Indonesia dan bagaimana solusi dalam membantu UMKM bertahan dalam situasi pandemi COVID-19. Dalam penulisan ini peneliti menggunakan penelitian kepustakaan yaitu dalam proses pengambilan datanya tidak perlu terjun ke dalam lapangan secara langsung tetapi mengambil berbagai sumber referensi yang mendukung suatu penelitian ini. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu menyimak serta mencatat informasi penting dalam melakukan analisis data dengan cara reduksi data, *display* data dan gambaran kesimpulan sehingga mendapatkan suatu gambaran kesimpulan mengenai studi literatur untuk dikembangkan dalam penelitian ini dan untuk validasi datanya menggunakan triangulasi sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Situasi pandemi COVID-19 memberikan tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah untuk menjaga eksistensi UMKM. Kajian yang dibuat oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan implikasi negatif bagi perekonomian domestik seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi UMKM. Lima aspek konsumsi dan daya beli masyarakat pada pandemi ini menyebabkan banyak tenaga kerja berkurang bahkan kehilangan pendapatannya sehingga berpengaruh pada tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat terutama mereka yang ada dalam kategori pekerja informal dan pekerja harian. Sebagian besar masyarakat sangat berhati-hati mengatur pengeluaran keuangannya karena ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir. Hal ini menyebabkan turunnya daya

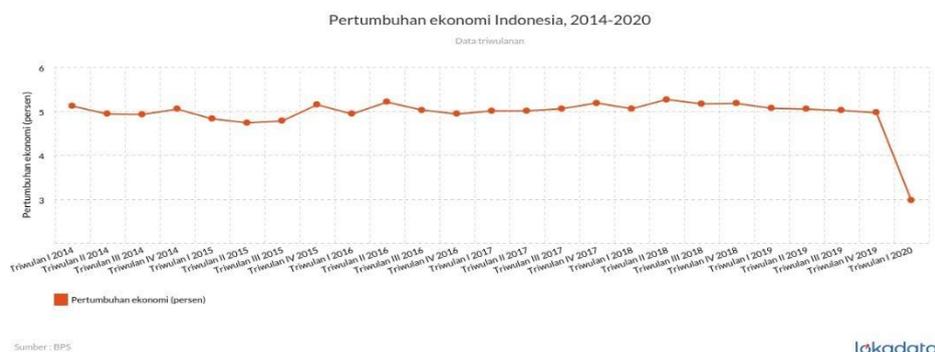
beli masyarakat akan barang-barang konsumsi dan memberikan tekanan pada sisi produsen dan penjual. Pada aspek perusahaan, pandemi ini telah mengganggu kinerja perusahaan-perusahaan terutama yang bergerak dalam sektor perdagangan, transportasi, dan pariwisata. Kebijakan *social distancing* yang kemudian diubah menjadi *physical distancing* dan bekerja dari atau di rumah berdampak pada penurunan kinerja perusahaan yang kemudian diikuti oleh pemutusan hubungan kerja. Bahkan ada beberapa perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan akhirnya memilih untuk menutup usahanya. Pada aspek perbankan dan keuangan, pandemi ini memunculkan ketakutan akan terjadinya masalah pembayaran hutang atau kredit yang pada akhirnya berdampak pada keberlangsungan kinerja bank. Banyak Kreditur yang sudah meminta kelonggaran batas dan besaran pembayaran cicilan hutang dan kredit kepada bank. Belum lagi para pengusaha harus memperhatikan fluktuasi nilai tukar rupiah yang akan mengganggu proses produksi terutama untuk perusahaan-perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor. Selain itu, pandemi ini menyebabkan ancaman kaburnya investasi asing dari Indonesia yang tentu mengancam proyek-proyek strategis pemerintah. Pada aspek UMKM, adanya pandemi ini menyebabkan turunnya kinerja dari sisi permintaan (konsumsi dan daya beli masyarakat) yang akhirnya berdampak pada sisi suplai yakni pemutusan hubungan kerja dan ancaman macetnya pembayaran kredit.

Sebagian besar UKM yang menghadapi guncangan eksternal menunjukkan pengambilan keputusan UKM. Fokus pada mengurangi arus kas negatif daripada meningkatkan rasio hutang terhadap ekuitas. UKM lebih memilih bangkrut daripada mendorong pada masalah keuangan di masa depan. UKM juga memilih strategi kelangsungan hidup dengan fokus pada biaya bukan pada peningkatan pendapatan atau meningkatkan inovasi yang menyebabkan UKM mengabaikan alternatif investasi dan cenderung mempertahankan sumber daya yang ada (Thorgren & Williams, 2020). Padahal dalam jangka panjang alternatif investasi akan membantu UKM bertahan seperti investasi dalam teknologi terutama teknologi berbasis online.



Gambar 1. Pergerakan IHSG
 Sumber: www.lokadata.beritagar.id (2020)

IHSG yang menguat menunjukkan berjalannya perekonomian Indonesia, kan tetapi pergerakannya masih belum mendongkrak kinerja ekonomi Indonesia.



Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
 Sumber: www.lokadata.beritagar.id (2020)

Berdasarkan data BPS pada gambar 2 Menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2020 berkontraksi 5,32% dari triwulan II 2019, dan berkontraksi sebesar 4,19% dari triwulan I 2020. Penurunan ini terjadi hampir di seluruh sektor usaha. Penurunan paling signifikan terjadi pada sektor usaha transportasi dan pergudangan mencapai 30,84%, disusul sektor penyedia akomodasi dan makan minum mencapai 22,02%. Namun demikian sebagian besar investasi menunjukkan kinerja yang menurun tetapi pada sektor *social entrepreneurship* masih tetap bertahan.

Perkembangan ekonomi dunia yang turun juga berdampak pada Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi

Indonesia pada kuartal 1 tahun 2020 hanya sebesar 2,97% jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2019 yang sebesar 4,97%. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 menurut Kepala BPS mengalami kontraksi -4.19%. Kontraksi ini terjadi karena investasi yang melemah dan penurunan tajam pada konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga yang turun pada akhirnya menyebabkan banyak usaha yang mengalami penurunan pendapatan sebagai dampak daya beli masyarakat yang turun.

Berdasarkan hasil survei *Katadata Insight Center* (KIC) yang dilakukan terhadap 206 pelaku UMKM di Jabodetabek mayoritas UMKM sebesar 82,9% merasakan dampak negatif dari pandemi ini dan hanya 5,9% yang mengalami pertumbuhan positif. Kondisi pandemi ini bahkan menyebabkan 63,9% dari UMKM yang terdampak mengalami penurunan omzet lebih dari 30%. Hanya 3,8% UMKM yang mengalami peningkatan omzet. Survei KIC tersebut juga menunjukkan para UMKM melakukan sejumlah upaya untuk mempertahankan kondisi usahanya. Mereka melakukan sejumlah langkah efisiensi seperti menurunkan produksi barang/jasa, mengurangi jam kerja, jumlah karyawan, dan saluran penjualan/pemasaran. Meski begitu ada UMKM yang mengambil langkah sebaliknya yaitu menambah saluran pemasaran sebagai bagian strategi bertahan.

Sementara itu, hasil survei dari beberapa lembaga seperti BPS, Bappenas, dan World Bank menunjukkan bahwa pandemi ini menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Bahkan beberapa di antaranya terpaksa sampai harus melakukan PHK. Kendala lain yang dialami UMKM, antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat. Selain itu, perubahan perilaku konsumen dan peta kompetisi bisnis juga perlu diantisipasi oleh para pelaku usaha karena adanya pembatasan kegiatan. Konsumen lebih banyak melakukan aktivitas di rumah dengan memanfaatkan teknologi digital, sedangkan perubahan lanskap industri dan peta kompetisi baru ditandai dengan empat karakteristik bisnis yaitu *Hygiene, Low-Touch, Less Crowd, dan Low-Mobility* (CNBC Indonesia, 28 April 2021).

Dari kondisi tersebut, dapat terlihat bahwa sektor UMKM yang mayoritas pelakunya adalah warga kelas menengah ke bawah terdampak besar akibat pandemi

COVID-19. Perusahaan yang sukses di era pandemi merupakan perusahaan yang dapat beradaptasi dengan empat karakteristik tersebut. Pelaku usaha termasuk UMKM perlu berinovasi dalam memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar. Para pelaku usaha ini juga dapat menumbuhkembangkan berbagai gagasan dan ide usaha baru yang juga dapat berkontribusi sebagai pemecah persoalan sosial-ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi.

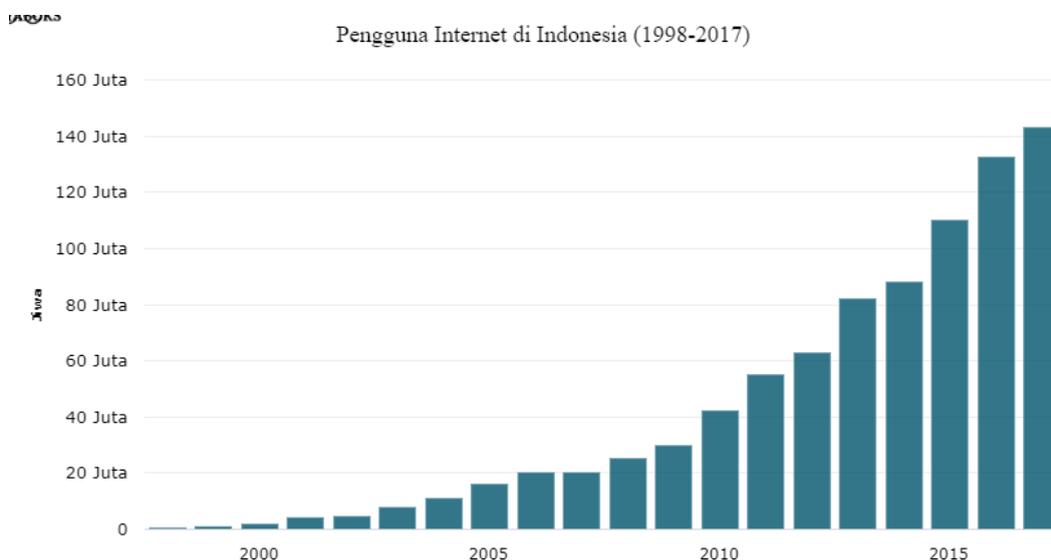
Aktivitas bisnis dan prospek pertumbuhan sektor UMKM cenderung semakin membaik pada kuartal I/2021. Pemulihan UMKM ini memberikan sinyal positif semakin pulihnya perekonomian nasional yang sempat tertekan akibat pandemi COVID-19. BRI Micro & SME Index (BMSI) terbaru mencatat adanya kenaikan signifikan dalam Indeks Aktivitas Bisnis (IAB), Indeks Ekspektasi Aktivitas Bisnis (IEAB), dan Indeks Sentimen Bisnis (ISB) per kuartal I tahun ini dibandingkan dengan kuartal IV/2020. Riset tersebut menunjukkan peningkatan BMSI menjadi 93,0 dari sebelumnya 81,5 pada kuartal IV/2020. Selain itu, pelaku UMKM juga makin optimistis terhadap prospek usahanya yang ditunjukkan dengan meningkatnya indeks ekspektasi BMSI menjadi 128,0 dari sebelumnya 105,4 pada kuartal IV/2020. Sejalan kenaikan BMSI dan ekspektasinya, persepsi pelaku UMKM juga meningkat terhadap perekonomian secara umum. ISB pelaku UMKM meningkat signifikan menjadi 115,5 dari sebelumnya 90,2 pada kuartal IV/2020. Kenaikan IAB, IEAB, dan ISB menunjukkan mulai berputarnya aktivitas UMKM di lapangan, tingginya optimisme mereka atas kondisi yang lebih baik (Bisnis Indonesia, 17 Mei 2021).

Optimisme yang tercermin melalui hasil riset tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, meningkatnya aktivitas masyarakat karena angka infeksi baru dan kasus aktif COVID-19 terus turun ditengah makin meluasnya program vaksinasi. Kedua, naiknya produksi barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang disebabkan oleh hari besar seperti Imlek dan hari raya Idul Fitri. Ketiga, panen raya di sejumlah daerah yang mendorong kenaikan harga komoditas. Keempat, relaksasi dari pemerintah kepada pengusaha sektor properti dan relaksasi pembelian rumah baru.

Banyaknya usaha yang memilih tutup atau bangkrut pada akhirnya menyebabkan kondisi perekonomian menjadi melemah. Di Indonesia pandemi COVID-19 berdampak pada sektor transportasi, pariwisata, perdagangan, kesehatan

dan sektor lainnya, namun sektor ekonomi yang paling terkena dampak COVID-19 adalah rumah sektor industri tangga. Terganggunya sistem produksi serta rantai pemasok, transportasi, dan distribusi secara global juga berdampak pada perekonomian di Indonesia ditambah lagi pendapatan yang turun. Meskipun banyak usaha yang bangkrut masih ada satu peluang yang dapat menjadi harapan bergulirnya ekonomi kerakyatan melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM yang tumbuh dan berkembang dengan baik adalah UMKM yang telah menerapkan dan tergabung dalam ekosistem digital, sehingga penting segera dilakukan adalah transformasi UMKM dari *offline* ke *online*. Transformasi ini harus segera dilakukan mengingat adanya perubahan perilaku konsumen ke *online*. Penyebaran virus Corona pada akhirnya menyebabkan terjadinya perubahan perilaku konsumen, perubahan pasar langsung menjadi pasar *online*.

Pemanfaatan internet yang signifikan menunjukkan potensi untuk tumbuh kembang usaha dan bertahan dimasa Pandemi COVID-19 masih terbuka. Menurut publikasi digital report oleh *we are social* dan *Hootsuite* (2020) menunjukkan tren pengguna internet pada Januari 2020 mencapai 175,4 juta. Hal ini mengidentifikasi bahwa terdapat perubahan perilaku konsumen.



Gambar 3. Pengguna Internet
Sumber: www.lokadata.beritagar.id (2020)

Pesatnya perkembangan teknologi dan perilaku masyarakat yang ingin praktis dan cepat pada akhirnya membuka peluang bagi UMKM untuk tumbuh dengan

memanfaatkan teknologi. Tentunya dengan memanfaatkan digital teknologi, UMKM masih memiliki peluang untuk menjadi pilar ekonomi kerakyatan. UMKM sejak tahun 2016-2019 tumbuh sebesar 4,2% setiap tahunnya dengan rata-rata kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia adalah sebesar 50% sejak 3 tahun terakhir (Soetjipto, 2020), akan tetapi menurut data center di Kementerian Koperasi dan UKM sejak mewabahnya Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan penjualan produk UMKM sebesar 57% (www.merdeka.com). Terdapat penurunan pendapatan UMKM masih menjadi alternatif Bergeraknya perekonomian kerakyatan. Hal ini disebabkan pada sifat UMKM itu sendiri yang fleksibel dan mudah berinovasi baik dalam usaha maupun menerapkan teknologi tepat guna dan birokrasi sederhana. Alasan lainnya yang menyebabkan UMKM mampu bertahan adalah karena UMKM menghasilkan produk/jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, memanfaatkan sumber daya lokal (pekerja lokal dan bahan baku lokal). Merujuk pada penjelasan diatas maka penelitian ini akan membahas mengenai potensi UMKM menjadi ekonomi kerakyatan dimasa pandemi COVID-19.

Salah satu solusi penting pemulihan UMKM adalah insentif bagi UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah pusat di 2020 dan dilanjutkan di 2021. Hasilnya adalah sebagian sektor informal dan UMKM dapat bertahan menghadapi dampak pandemi COVID-19, artinya tidak mengalami krisis yang sangat berat dibandingkan beberapa industri besar. Selain itu, program ini diharapkan dapat membantu menekan penurunan pemutusan hak kerja (PHK) pada UMKM. Berdasarkan data BPS per Agustus 2020, terdapat penciptaan kesempatan kerja baru dengan penambahan 760 ribu orang yang membuka usaha dan kenaikan 4,55 juta buruh informal (CNBC Indonesia, 28 April 2021).

Dari total anggaran sebesar Rp699,43 triliun hingga 11 Mei 2021 realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah mencapai Rp172,35 triliun. Realisasi anggaran sebesar 24,6% dari total anggaran tersebut meningkat Rp49,01 triliun dari realisasi triwulan I, yakni Rp123,26 triliun. Adapun sektor-sektor tersebut, yakni kesehatan sebesar Rp24,90 triliun atau 14,2% dari pagu Rp175,22 triliun, perlindungan sosial terserap Rp56,79 triliun atau 37,8% dari pagu Rp150,28 triliun, program prioritas Rp21,8 triliun atau 17,6% dari pagu Rp123,67 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp42,03 triliun atau 21,7% dari pagu Rp193,53

triliun, dan insentif usaha Rp26,83 triliun atau 47,3% dari pagu Rp56,72 triliun. Di sisi lain, percepatan penyaluran perlindungan sosial pemerintah juga tampak dari besarnya serapan anggaran itu.

Dalam penyaluran dana PEN atau dukungan UMKM secara khusus pemerintah harus memastikan bahwa dana dukungan dapat disalurkan secara cepat dan tepat sasaran. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kurang terintegrasinya data UMKM yang ada. Skema dukungan UMKM melalui subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) juga perlu mendapat perhatian lebih mengingat masih banyak UMKM yang masih belum tersentuh layanan perbankan.

Hingga 11 Mei 2021 tercatat realisasi penyaluran bantuan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Rp13,83 triliun atau 48,19% dari anggaran Rp28,71 triliun. Lalu, realisasi kartu sembako mencapai Rp17,24 triliun atau 38,20% dari anggaran Rp45,12 triliun. Realisasi penyaluran bantuan sosial tunai (BST) mencapai Rp11,81 triliun atau 98,39% dari anggaran Rp12,0 triliun dan program bantuan langsung tunai (BLT) dana desa mencapai Rp2,51 triliun atau 17,41% dari anggaran Rp14,4 triliun (Media Indonesia, 18 Mei 2021). Khusus untuk program dukungan UMKM telah terealisasi sebesar Rp40,23 triliun atau 20,8% dari pagu sebesar Rp191,13 triliun. Realisasi untuk program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp12,8 triliun atau sebesar 88,11% dari pagu yang mencapai 15,36 triliun. Pemerintah juga terus berupaya mendorong para pelaku UMKM untuk *on board* ke platform digital melalui Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), dimana hingga akhir 2020 sudah terdapat 11,7 juta UMKM *on boarding*.

Pemerintah juga terus berupaya mendorong para pelaku UMKM untuk *on board* ke platform digital melalui Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), dimana hingga akhir 2020 sudah terdapat 11,7 juta UMKM *on boarding*. Pada 2030 targetnya jumlah UMKM yang *go digital* akan mencapai 30 juta. Perluasan ekspor produk Indonesia bagi UMKM juga dilakukan melalui ASEAN *Online Sale Day* (AOSD) di 2020. Dari 64,19 juta UMKM di Indonesia, sebanyak 64,13 juta masih merupakan UMK yang masih berada di sektor informal sehingga perlu didorong untuk bertransformasi ke sektor formal (CNBC Indonesia, 28 April 2021). Dorongan UMKM untuk memanfaatkan platform digital sangat dibutuhkan apalagi pada kondisi pandemi saat ini. Pemanfaatan platform digital

dapat meningkatkan efisiensi serta menambah saluran penjualan/pemasaran sektor UMKM yang saat ini terbatas akses fisiknya dengan pelanggan/pengguna jasa.

Percepatan vaksinasi juga didorong untuk memulihkan kepercayaan konsumsi masyarakat termasuk bagi karyawan dan pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Vaksinasi sudah dan akan diberikan secara gratis untuk mencapai *herd immunity* dari 181,55 juta penduduk (kemenkeu.go.id, 6 Mei 2021). Program vaksinasi gotong royong pendanaannya dibebankan pada badan hukum atau badan usaha yang mampu. Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK 01. 07/Menkes/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi *Sinopharm*, pemerintah menetapkan harga vaksin senilai Rp321.660 per dosis, ditambah biaya penyuntikan Rp117.910 sehingga total harga menjadi Rp879.140 per dua kali suntikan. Asosiasi UMKM menyatakan bahwa kemampuan perusahaan UMKM untuk mengikuti program Vaksinasi Gotong Royong jauh di bawah nominal yang ditetapkan oleh Pemerintah dan menganggap harga yang ditetapkan oleh pemerintah terlalu mahal (Bisnis Indonesia, 17 Mei 2021). Hal tersebut berpotensi membuat banyak perusahaan terutama UMKM enggan mengikuti program, sehingga percepatan pelaksanaan vaksinasi terkendala. Sehubungan masalah ini, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memberikan subsidi khusus untuk program Vaksinasi Gotong Royong bagi badan usaha yang memang tak mampu.

Selain itu, pemerintah akan mendukung sektor Hotel, Restoran, Kafe (HOREKA) melalui restrukturisasi kredit dan penjaminan kredit. Relaksasi Kebijakan Restrukturisasi Kredit Perbankan, perluasan Penjaminan Kredit Korporasi berdasarkan PMK32/2021, subsidi bunga untuk UMK, baik KUR dan *Non-KUR*, serta penambahan plafon KUR 2021 dari sebesar Rp253 triliun menjadi Rp285 triliun, mengoptimalkan pemanfaatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta melanjutkan Program Kartu Prakerja (Kemenkeu, 6 Mei 2021).

Rencana pemerintah dalam membentuk holding BUMN ultra mikro pada semester II tahun ini juga dianggap dapat mendorong pemberdayaan UMKM. Pembentukan *holding* BUMN ultra mikro dibutuhkan untuk mensinergikan gerak ketiga perusahaan yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Tanpa *holding* gerak tiga perusahaan negara ini dalam mengembangkan pelaku UMKM dan usaha mikro

berjalan sendiri-sendiri (Beritasatu, 7 Mei 2021). Pembentukan holding BUMN ultra mikro diharapkan dapat memastikan terciptanya penyaluran pembiayaan kredit mikro

yang lebih terarah, bunga lebih rendah, mudah dan mampu menjangkau banyak calon nasabah. Manfaat yang diharapkan tersebut akan dapat mendukung pelaku UMKM untuk mendapatkan pasar dan peluang pemasaran yang lebih luas dari sebelumnya. *Holding* BUMN ini juga diharapkan dapat mengatasi masalah data UMKM yang saat ini masih belum terintegrasi.

Pemerintah mampu memastikan terciptanya penguatan industri dalam negeri terutama industri alat kesehatan sebagai antisipasi merebaknya pandemi di masa yang akan datang. Jika kebijakan dari sisi penawaran telah diambil, maka fokus kebijakan jangka menengah selanjutnya yang dapat diambil oleh pemerintah adalah upaya-upaya pemulihan *aggregate demand* . Penghapusan pajak seperti PPN dan PPh setelah pandemi akan membantu mendorong permintaan (*demand*). Pemerintah harus memberi stimulus kepada rumah tangga untuk mengonsumsi barang manufaktur dan sektor jasa seperti restoran, hotel, dan pariwisata serta angkutan dan penerbangan. Secara mikro melalui kebijakan perusahaan, dalam rangka menata kembali kondisi ekonomi UMKM yang melemah atau resesi akibat COVID-19 ini diperlukan pengelolaan siklus bisnis secara *Management Business Cycle* mengingat kondisi lingkungan bisnis sangatlah dinamis sehingga harus selalu dievaluasi dan diperbaiki siklus usahanya sehingga usaha bisa bertahan dan dapat terus berkembang dengan cara yaitu:

1. Menciptakan perubahan sebagai peluang untuk mencapai sukses,
2. Melihat perbedaan antar orang atau fenomena sebagai peluang bukan kesulitan,
3. Bereksperimen untuk mencari pembaharuan menuju pertumbuhan bisnis,
4. Menjadi pakar untuk usaha sendiri,
5. Menjadi pelayan untuk orang lain dan memiliki sifat rendah hati.

Dengan kemampuan pengelolaan siklus bisnis tersebut, sebuah perusahaan pun harus dapat bertumbuh dan berkembang dalam jangka panjang dengan memperhatikan faktor-faktor diantaranya:

1. *Strategic Intent* (Kesatuan Visi dan Misi)
2. *Decision Maker* (Pengambilan Keputusan yang Cepat dan Tepat)

3. *Funding* (Manajemen Keuangan Terencana)
4. *Business Plan* (Perencanaan Bisnis)
5. Manajemen Tim
6. *Execution*
7. *Timing* (Saat yang tepat memulai usaha).

Mengelola siklus bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penggunaan sumber daya organisasi, maka perencanaan dan pengorganisasian harus memperhatikan siklus bisnis pada 4 periode yaitu:

1. Puncak Siklus (Kemakmuran)
2. Resesi (Kemerossotan)
3. Palung (Depresi Paling Parah)
4. Pemulihan (Ekspansi)

Yang dapat menggambarkan klasifikasi jenis bisnis dengan bidang usaha atau peluang usaha pasca COVID-19, sehingga pelaku bisnis UMKM dapat mengidentifikasi jenis bisnis sesuai siklus bisnis yang dialami pada masa pandemi COVID-19 dan mengambil tindakan yang sesuai dengan jenis bisnisnya.

Beberapa pengusaha menilai bagaimana kebutuhan yang muncul terkait dengan krisis bisnis COVID-19 dapat mempengaruhi bisnis mereka dan mengambil tindakan yang tepat, dengan mempertimbangkan juga beberapa aspek kompetitif seperti perencanaan skenario, analisis pemangku kepentingan, pengembangan strategi, komunikasi eksternal dan internal. Indikator yang dapat digunakan di perusahaan untuk mengevaluasi kapasitas reaktifnya dan memahami kemungkinan dampak perubahan digital untuk mengurangi efek negatif dari masalah krisis COVID-19. Setelah latar belakang teoritis jelas, analisis status eksternal dan internal telah dilakukan, UKM harus merefleksikan model bisnis mereka sendiri.

Transformasi digital tidak hanya berarti memperkenalkan teknologi baru untuk melakukan aktivitas yang ada tetapi juga proses mendesain ulang seluruh model bisnis. Demi mendukung usaha pengusaha dalam mengimplementasikan model bisnis baru dan transformasi digital pada usaha mereka, penting bagi pemerintah membuat kebijakan struktural untuk kepentingan jangka panjang. Kebijakan ini tidak saja digunakan untuk menghadapi pandemi COVID-19 tapi juga era industri 4.0 kedepannya.

Cara lain yang dapat dilakukan untuk membantu UMKM bertahan dalam situasi pandemi ini adalah dengan memanfaatkan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dimiliki oleh perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah perlu mengeluarkan instruksi dan pedoman untuk seluruh BUMN agar mengalihkan dana TJSL yang ada untuk membantu secara langsung UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. BUMN pun dapat melibatkan UMKM dalam proses produksi produk-produk yang bisa diisi oleh para pekerja UMKM. Misalnya, BUMN yang bergerak dalam produksi farmasi dan Alat Perlindungan Diri (APD) seperti masker dan pakaian medis dapat melibatkan para pekerja UMKM yang bergerak dalam bidang usaha produksi pakaian untuk memproduksi dalam skala besar kebutuhan APD. Melihat potensi pasar mengenai kebutuhan APD baik untuk kebutuhan domestik maupun internasional, peluang ini dapat dimanfaatkan sekaligus memberi rasa aman terhadap ancaman pemutusan hubungan kerja atau penutupan produksi yang dialami UMKM dalam jangka pendek. Untuk perusahaan swasta, dana TJSL juga bisa dialihkan untuk membantu UMKM yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Bentuk bantuan bisa dalam bentuk bantuan langsung seperti pemberian paket sembako atau pembelian produk-produk UMKM untuk kemudian disalurkan ke tempat lain. Tindakan seperti ini setidaknya dalam jangka pendek mampu memberikan rasa aman kepada para pelaku UMKM.

KESIMPULAN

UMKM berpotensi dalam menyangga perekonomian dimasa pandemi COVID-19. Potensi ini terlihat pada peran UMKM sebagai sumber pendapatan masyarakat, mengatasi pengangguran, berkontribusi pada PDB, Devisa Negara serta investasi. Potensi ini sesuai dengan amanah UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. UMKM dimasa Pandemi bisa bertahan dan tumbuh ketika memiliki sumber daya manusia yang menguasai teknologi digital.

Dampak wabah COVID-19 kepada perekonomian dialami oleh seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia mengalami dampak perekonomian yang cukup besar. UMKM dalam hal ini menjadi bagian yang sangat terpukul dalam krisis ini, memperhatikan kontribusi UMKM terhadap jumlah unit usaha, sumbangan PDB, serapan tenaga kerja, ekspor dan investasi terhadap perekonomian yang ada di

Indonesia yang sangat besar. Kebijakan pemerintah tersebut juga dibagi dalam berbagai strategi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang seperti pada jangka pendek dan mendesak, pemerintah berfokus pada pengurangan penambahan korban jiwa COVID-19 dengan penekanan pada stimulus sektor kesehatan dan bantuan kesejahteraan bagi rakyat yang terdampak, dan untuk kebijakan jangka menengah diantaranya, memastikan dunia usaha untuk beroperasi, menjaga kesinambungan sektor logistik dan mendorong kemandirian industri alat kesehatan, sedangkan strategi jangka panjang difokuskan pada pengenalan dan penggunaan teknologi digital bagi UMKM sekaligus persiapan untuk memasuki era industri. Pada masa pandemi COVID-19 yang tidak ada kepastian kapan akan berakhirnya pandemi tersebut, maka UMKM selaku entitas bisnis harus dapat mengelola *management business cycle*. Dengan mengelola *management business cycle* dengan baik dan perubahan bisnis model dan transformasi digital dengan menyesuaikan kondisi pandemi COVID-19 ini maka diharapkan strategi perusahaan UMKM dapat berhasil mengatasi tantangan. Akhir kata, sinergi antara kebijakan makro pemerintah dengan kebijakan mikro perusahaan diharapkan dapat membantu UMKM dalam mengatasi tantangan menghadapi krisis pandemi COVID-19.

Penelitian lebih lanjut dapat menggali secara kuantitatif potensi yang dimiliki UMKM sehingga dapat dilihat besaran potensi yang dimiliki oleh UMKM sebagai penopang perekonomian kerakyatan. Pandemi COVID-19 berdampak besar pada penurunan perekonomian nasional termasuk sektor UMKM. Namun, seiring menurunnya jumlah penularan COVID-19 dan berjalannya program vaksinasi menumbuhkan optimisme sektor UMKM dapat pulih pada tahun 2021 ini. Pemerintah sejak 2020 mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mendukung pemulihan sektor UMKM antara lain penyaluran PEN bagi sektor UMKM, program Gernas BBI, program vaksinasi, restrukturisasi kredit, dan rencana pembentukan *holding* BUMN ultra mikro. DPR RI melalui komisi terkait perlu memberikan dukungan dan perhatian pada pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang diambil guna memulihkan sektor UMKM agar momentum pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 ini dapat terwujud.

REFERENSI

Abrar, T. F. (2020, April 19). Retrieved from Jangan Kaget, Ini Prediksi Sri Mulyani

- Asmini, I. N. (n.d.). Manajemen Bussines Cycle Sebagai Basis Peluang Usaha Pasca Covid-19. Suatu strategi pemulihan Ekonomi Masyarakat.
- Atra, P. A. (n.d.). Retrieved from Dampak Covid-19 Terhadap Sektor UKM di Indonesia: <https://maucash.id/dampak-covid19-terhadap-bisnis-usaha-kecil-menengahukm-di-indonesia>
- CASALINO, N. D. (n.d.). A Quality Management Training system Concering ISO Standards. Productivity and Quality Management.
- Hakim, Rakhmat Nur. “Jokowi Gelontorkan Rp 405,1 Triliun untuk Atasi Covid-19, Ini Rinciannya.” Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/18253871/jokowi-gelontorkan-rp>
- Hapsari, I. M. (2014). Identifikasi Berbagai Permasalahan Yang Dihadapi Oleh UKM Dan Peninjauan Kembali Regulasi UKM Sebagai Langkah Awal Revitalisasi UKM. *Permana*, V(No. 2), 43–47.
- Kuckertz, A., Brändle, L., Gaudig, A., Hinderer, S., Morales Reyes, C. A., Prochotta, A., Steinbrink, K. M., & Berger, E. S. C. (2020). Startups in times of crisis – A rapid response to the COVID19 pandemic. *Journal of Business Venturing Insights*, 13(April). <https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2020.e00169>
- Kumar, A., Luthra, S., & Kumar, S. (2020). COVID-19 impact on sustainable production and operations management. 1(May), 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.susoc.2020.06.001>
- Mirza, N., Naqvi, B., Rahat, B., & Rizvi, S. K. A. (2020). Price reaction, volatility timing and funds’ performance during Covid-19. *Finance Research Letters*, April, 101657. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101657>
- Soal Ekonomi RI: <https://www.cnbcindonesia.com/market/2020041909261317152924/jangan-kaget-ini-prediksi-sri-mulyani-soal-ekonomi-ri>